

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

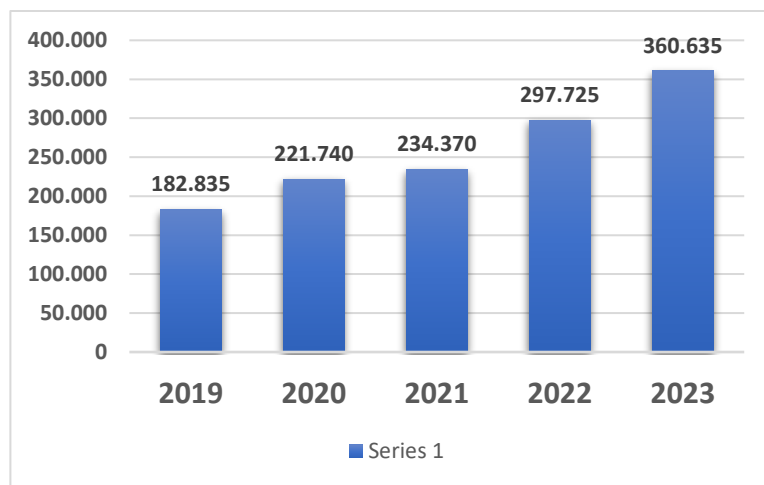
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu aspek krusial dalam setiap lingkungan kerja dengan tujuan utama sebagai kebijakan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja serta penyakit yang diakibatkan saat bekerja. Penerapan K3 tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menjaga produktivitas dan kesejahteraan karyawan. K3 berfungsi sebagai fondasi untuk terciptanya suatu lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja, maka bisa meminimalisir suatu kemungkinan terjadinya insiden yang merugikan baik bagi pekerja maupun perusahaan.

Kemampuan K3 untuk mencegah kecelakaan kerja adalah salah satu alasan utama mengapa kebijakan K3 merupakan suatu hal yang sangat penting. Kecelakaan kerja dapat terjadi di mana saja, terutama di bidang yang sangat rentan seperti konstruksi, pertambangan, dan pabrik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip K3, perusahaan dapat menemukan potensi bahaya dan mengambil tindakan pencegahan dengan mengikuti standar K3. Dengan adanya pelatihan keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh karyawan dapat secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja.

Selain itu, K3 juga berperan dalam mencegah penyakit akibat kerja. Banyak pekerja terpapar kondisi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, seperti paparan bahan kimia berbahaya atau lingkungan kerja yang tidak sehat. Dengan penerapan standar K3 yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko tersebut dan memastikan bahwa pekerja tetap sehat dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap K3 bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan.

Di Indonesia, perhatian terhadap penerapan K3 semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan proyek pembangunan infrastruktur yang pesat.

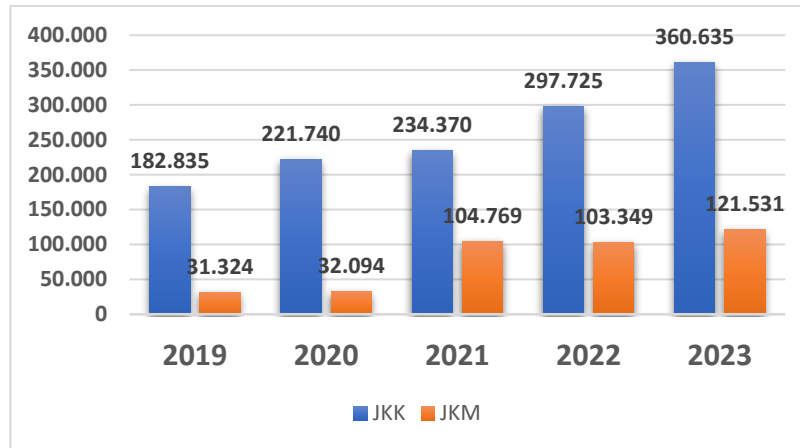
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia selalu meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sektor konstruksi, pertambangan, dan pengolahan adalah beberapa industri yang mengalami tingkat kecelakaan kerja tertinggi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa 40% kecelakaan kerja di Indonesia berasal dari sektor konstruksi, lalu 25% kecelakaan kerja berasal dari sector pertambangan, lalu diikuti oleh sector manufaktunya sebanyak 20% kecelakaan kerja. Selain itu, sektor pertanian dan transportasi juga tidak luput dari kecelakaan kerja.



Gambar 1. 1 Jumlah Data Kecelakaan Kerja di Indonesia

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (2023)

Menurut data di atas, dapat dilihat bahwa kecelakaan kerja di Indonesia selalu mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Hal ini juga dapat dilihat dari lonjakan jumlah klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM). Jaminan Kematian (JKM) merupakan suatu fasilitas pemerintah berupa perlindungan atas risiko kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian kepada para tenaga kerja. Sedangkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), merupakan fasilitas pemerintah berupa perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Kedua program tersebut merupakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berikut merupakan data dari BPJS Ketenagakerjaan, yakni:



Gambar 1. 2 Jumlah Klaim JKK & JKM di Indonesia

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan (2023)

Berdasarkan data di atas, jumlah klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan, kecuali jumlah klaim Jaminan Kematian (JKM) pada tahun 2022 sebanyak 103.349 yang terdapat sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 104.769 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2023 jumlah klaim Jaminan Kematian (JKM) kembali melonjak menjadi sebanyak 121.531. Hal ini menunjukkan bahwa, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi hal yang krusial di Indonesia.

Peningkatan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang signifikan setiap tahunnya menandakan bahwa upaya pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Untuk itu, penerapan standar internasional yang dapat membantu organisasi dalam mengelola risiko terkait K3 menjadi sangat penting. Salah satunya adalah OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Assessment Series*), yang merupakan standar internasional yang dirancang khusus untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) merupakan standar internasional yang digunakan untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Standar ini bertujuan membantu organisasi dalam mengenali, mengelola, dan meminimalkan risiko yang berkaitan dengan kesehatan serta keselamatan di lingkungan kerja. Dengan menerapkan OHSAS 18001, organisasi dapat menciptakan tempat kerja yang lebih aman serta sehat bagi para karyawan. Adapun tujuan utama penerapan standar ini adalah meningkatkan kinerja K3, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku, mengurangi kejadian kecelakaan kerja, membangun budaya keselamatan dalam organisasi, serta menjaga keberlanjutan bisnis melalui pengelolaan risiko secara proaktif.

Implementasi OHSAS 18001 memberikan berbagai manfaat bagi organisasi. Dengan menerapkan standar ini, angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, produktivitas dan moral karyawan meningkat seiring dengan terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman. Implementasi ini juga berkontribusi dalam mengurangi biaya yang berkaitan dengan kompensasi kecelakaan kerja. Pada tahun 2018, OHSAS 18001 resmi digantikan oleh ISO 45001 sebagai standar internasional terbaru untuk sistem manajemen K3. ISO 45001 mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi dengan standar manajemen lainnya, seperti ISO 9001 untuk Manajemen Mutu dan ISO 14001 untuk Manajemen Lingkungan.

Di tingkat nasional, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi pijakan utama dalam upaya perlindungan tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di berbagai tempat kerja. Untuk memperkuat implementasi sistem manajemen K3 secara menyeluruh, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mewajibkan perusahaan dengan jumlah tenaga kerja tertentu dan tingkat risiko tinggi untuk menerapkan SMK3.

Sebagai tindak lanjut, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 hadir guna mengatur secara teknis mengenai standar keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja, termasuk pengendalian

faktor bahaya fisik, kimia, dan biologi. Ketiga regulasi ini menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kebijakan K3 di tingkat perusahaan, termasuk di PT Indosafety Sentosa Industry yang menjadi objek dalam penelitian ini

Di Indonesia, penerapan sistem manajemen K3 sejalan dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan ini mewajibkan perusahaan dengan tingkat risiko tinggi dan jumlah tenaga kerja tertentu untuk menerapkan SMK3 guna melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Implementasi SMK3 di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip yang serupa dengan OHSAS 18001 dan ISO 45001, termasuk identifikasi risiko, pelaksanaan tindakan pengendalian, serta audit dan tinjauan berkala untuk memastikan efektivitasnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan budaya K3 yang berkelanjutan di dunia industri dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Namun, meskipun kebijakan dan regulasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sudah jelas diatur oleh pemerintah, implementasinya di berbagai sektor industri masih menghadapi banyak kendala. Beberapa perusahaan mungkin sudah memiliki sistem manajemen K3 yang baik, namun penerapannya belum maksimal di lapangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengawasan yang efektif, pemahaman yang tidak merata tentang pentingnya K3, serta keterbatasan sumber daya dalam penyediaan fasilitas keselamatan yang memadai. Oleh karena itu, pengamatan terhadap efektivitas penerapan kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sangat diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif dalam mengurangi angka kecelakaan dan memastikan kesehatan pekerja.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, terutama dalam sektor-sektor yang berisiko tinggi seperti konstruksi dan manufaktur, penting untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah mengimplementasikan sistem manajemen K3, seperti PT Indosafety Sentosa Industry. PT Indosafety Sentosa Industry

menjadi salah satu contoh perusahaan yang telah berhasil mengaplikasikan kebijakan SMK3 dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Indosafety Sentosa Industry menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Hal ini tercermin dari keberhasilan perusahaan dalam memenuhi salah satu tepat dalam teori efektivitas kebijakan dalam (Nugroho, 2003), yaitu **tepat kebijakan**. Tepat kebijakan berarti bahwa kebijakan yang diterapkan mampu secara nyata menjawab permasalahan yang ada. Dalam konteks ini, kebijakan SMK3 terbukti mampu menekan angka kecelakaan kerja secara signifikan selama empat tahun terakhir.



Gambar 1. 3 Jumlah Data Kecelakaan Kerja di PT Indosafety Sentosa Industry

Sumber: PT Infosafety Sentosa Industry (2025)

Bukti konkret dari keberhasilan tersebut dapat dilihat dari data penurunan jumlah kecelakaan kerja sejak tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak enam kasus kecelakaan kerja, lalu menurun menjadi empat kasus pada tahun 2022. Tren penurunan ini berlanjut secara signifikan pada tahun 2023 dan 2024, di mana masing-masing hanya terdapat satu kasus kecelakaan. Data ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SMK3 tidak

hanya bersifat administratif semata, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketepatan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indosafety Sentosa Industry?
2. Bagaimana ketepatan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indosafety Sentosa Industry?
3. Bagaimana ketepatan target Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indosafety Sentosa Industry?
4. Bagaimana ketepatan lingkungan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indosafety Sentosa Industry?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini yaitu bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indosafety Sentosa Industry.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan target Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indosafety Sentosa Industry.
3. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan target Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indosafety Sentosa Industry.
4. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan lingkungan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indosafety Sentosa Industry.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik. Fokus utama kajian adalah kebijakan publik dan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

2. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menambahkan pemahaman mengenai pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu, penelitian ini dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan kerja formal maupun non-formal. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap budaya kerja yang aman dan sehat.

E. Kerangka Berpikir

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Keberadaan teori tersebut membantu peneliti dalam menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diterapkan di PT Indosafety Sentosa Industry. Dalam meninjau permasalahan dan upaya penanganannya, sangat penting untuk merujuk pada teori yang relevan dan memiliki dasar ilmiah yang kuat terkait efektivitas suatu kebijakan.

Efektivitas merupakan fokus bahasan penelitian, dalam melakukan proses pembahasan dan memecahkan masalah merujuk pada teori dan konsep yang relevan yang dijelaskan oleh para ahli. Sedarmayanti dalam (Tri Sakti, 2017:60) mengungkapkan efektivitas adalah ukuran yang memberi gambaran mengenai sejauh mana suatu target bisa tercapai

Menurut Riant Nugroho (2003), efektivitas kebijakan dapat dilihat melalui lima variabel utama yang dikenal dengan "Empat Tepat", yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dapat tercapai dengan baik. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tepat Kebijakan:** Ketepatan suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana isi kebijakan tersebut benar-benar mengandung solusi atas permasalahan yang ingin diselesaikan. Pertanyaan utamanya adalah, seberapa baik kualitas kebijakan tersebut. Selain itu, aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah apakah kebijakan tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan secara tepat, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai proses perumusan kebijakan.
2. **Tepat Pelaksanaan:** Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Terdapat tiga bentuk pelaksana kebijakan yang umum, yaitu oleh pemerintah secara langsung, melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat atau sektor swasta, serta melalui mekanisme privatisasi atau kontrak pihak ketiga (*contracting out*). Yang terpenting adalah kebijakan dijalankan oleh pihak yang tepat, yakni aktor yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengimplementasikannya secara efektif.
3. **Tepat Target:** Sebuah kebijakan perlu memiliki sasaran yang jelas dan tepat, sejalan dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Ketepatan target mencakup apakah pihak atau kelompok yang menjadi sasaran intervensi benar-benar sesuai dengan yang direncanakan, dan apakah mereka berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima intervensi tersebut.
4. **Tepat Lingkungan:** Dalam proses implementasi kebijakan, penting untuk mempertimbangkan lingkungan kebijakan sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan. Lingkungan kebijakan mencakup interaksi antara lembaga yang merumuskan kebijakan dengan institusi lain yang turut berperan dalam pelaksanaannya. Koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarlembaga menjadi hal yang krusial untuk membangun keselarasan dalam penerapan kebijakan.

Keempat tepat tersebut saling berhubungan dan menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam mengkaji efektivitas kebijakan ini, teori Nuroho digunakan untuk menganalisis sejauh

mana kelima tepat tersebut berperan dalam penerapan SMK3 di PT Indosafety Sentosa Industry.

Efektivitas Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indosafety Sentosa Industry

- UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Smk3)
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja



Efektivitas Kebijakan menurut Riant Nugroho (2003) terdapat empat tepat :

1. Tepat kebijakan
2. Tepat pelaksana
3. Tepat target
4. Tepat lingkungan



Tercapainya Efektivitas Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indosafety Sentosa Industry

Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir

Sumber: Nugroho (2003)

Diolah Oleh Peneliti (2025)